

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) sangat berpengaruh signifikan terhadap ekonomi Indonesia sebagai penggerak ekonomi nasional yang melibatkan beberapa pelaku ekonomi dengan berbagai potensi yang dimiliki masing-masing. Hal ini ditunjukkan oleh kontribusi UMKM terhadap PDB pada tahun 2015-2019, yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kontribusi UMKM terhadap PDB pada tahun 2015-2019

Tahun	Kontribusi UMKM terhadap PDB Tingkat Pertumbuhan (%)
2015	57,8
2016	57,2
2017	57,1
2018	57,8
2019	60,3

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2020.

Tabel 1 menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB tertinggi pada tahun 2019 sebesar 60,3%, karena UMKM telah memanfaatkan digital teknologi sehingga membuka peluang UMKM untuk tumbuh (Nurlinda dan Sinuraya, 2020) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro (UU No. 20 Tahun 2008). Persaingan antar UMKM perlu dilakukan untuk menjadikan dorongan agar lebih berkualitas dan mumpuni dalam berbagai macam bidang usaha. Peran lembaga perbankan sangat penting bagi pengembangan UMKM, karena dapat memberikan kontribusi yang positif dari segi pembiayaan. Faktor penghambat utama dalam pengembangan UMKM antara lain perizinan, akses pembiayaan, serta informasi dan kemampuan mengakses pasar (Bappenas, 2016). Masalah perizinan menjadi hal yang paling krusial bagi usaha yang belum memiliki izin bahkan usaha yang sudah memiliki izin pun harus memperbaharui perizinan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pembiayaan dalam usaha dengan mengandalkan lembaga perbankan dianggap masih memberatkan bagi pelaku usaha kecil dan lebih memilih kredit usaha rakyat (KUR). Keterbatasan informasi dan akses pasar

masih menjadi polemik yang sering dihadapi setiap pelaku usaha. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit dan sebesar 0,01% diisi oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya 5.550 unit (Bank Indonesia, 2015). Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa UMKM sangat mendominasi pergerakan ekonomi Indonesia dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya yang ada di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 menjelaskan bahwa pengertian industri merupakan bentuk kegiatan ekonomi dalam mengolah bahan baku atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah dan manfaat, termasuk jasa industri. Industri secara nasional menjadi penggerak dalam pembangunan ekonomi karena berkontribusi dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa secara signifikan (Kementerian Perindustrian, 2019). Kegiatan produksi pada industri menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan menyerap tenaga kerja, sehingga mampu menyumbang devisa negara. UU No.3 Tahun 2014 menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan industri di Indonesia adalah:

1. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju serta industri hijau
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan

Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang PDB sebesar 19,86%, yaitu industri pengolahan nonmigas menyumbang 17,90% yang menyumbangkan persentase paling besar adalah subsektor industri makanan dan minuman sebesar 7,20% (Kementerian Perindustrian, 2020). Subsektor industri makanan dan

minuman menjadi penyumbang dengan persentase paling besar pada sektor industri pengolahan nonmigas karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat.

Industri mikro merupakan industri manufaktur dengan jumlah tenaga kerja sebesar 1-4 orang dan kategori tenaga kerja industri mikro kecil (IMK) tidak memiliki syarat mutlak pada taraf pendidikan (Diliana et al., 2020). Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan industri mikro cenderung lebih kecil dan tidak memiliki standar khusus tingkat pendidikan. Kendala yang dihadapi IMK adalah pemasaran, modal, bahan baku, dan adanya pesaing (Diliana et al., 2020). Jenis kendala yang paling banyak pemasaran karena usaha harus memikirkan strategi pemasaran. Masalah modal pada suatu usaha menjadi hal penting untuk membangun dan mengembangkan usaha. Bahan baku memiliki peran penting dalam proses pembuatan produk, ketersediaan bahan baku yang langka dapat menghambat proses produksi. Adanya pesaing pada usaha membuat pemilik usaha harus mampu mengembangkan inovasi dan kreativitas.

Industri rumah tangga adalah usaha yang dimiliki serta dikelola oleh anggota rumah tangga dalam bentuk usaha yang tidak berbadan hukum dan tidak memiliki catatan pembukuan yang lengkap (Badan Pusat Statistik, 2021). Industri rumah tangga belum berbadan hukum karena administrasi secara hukum yang rumit dan tidak memiliki catatan pembukuan yang lengkap karena setiap transaksi tidak dilakukan pencatatan. Jumlah usaha industri di Kota Bandar Lampung 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah usaha industri di Kota Bandar Lampung 2016-2020

Uraian	Tahun (Unit)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Industri Menengah	175	175	184	192	197
IKAHH	139	139	146	151	154
ILMEA	36	36	38	41	43
Industri Kecil	2.822	2.987	3.092	3.216	3.292
IKAHH	1.593	1.680	1.733	1.820	1.887
ILMEA	1.229	1.307	1.359	1.396	1.405
Industri Rumah Tangga	7.447	7.630	7.742	7.943	8.158
IKAHH	4.090	4.176	4.242	4.348	4.516
ILMEA	3.357	3.454	3.500	3.595	3.642
Jumlah / Total	10.444	10.792	11.018	11.351	11.647

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

Keterangan:

IKAHH = Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan

ILMEA = Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah industri rumah tangga di Bandar Lampung terus mengalami peningkatan pada setiap tahun. Jumlah industri rumah tangga di Bandar Lampung tertinggi pada tahun 2020 sebanyak 8.158 unit dan terendah pada tahun 2016 sebanyak 7.447 unit.

Tempe adalah makanan yang terbuat dari biji kedelai dan beberapa bahan lain yang dibuat melalui proses fermentasi yaitu ragi tempe (Badan Standarisasi Nasional, 2012). Tempe mengandung berbagai macam zat gizi yang baik bagi tubuh. Kandungan zat gizi tempe dalam 50 gram adalah 80 Kalori, 6 gram Protein, 3 gram Lemak, dan 8 gram Karbohidrat (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 41 Tahun 2014). Kandungan tertinggi pada tempe adalah karbohidrat dan protein. Fungsi primer dari karbohidrat, yaitu sebagai cadangan energi jangka pendek dan fungsi sekunder karbohidrat sebagai cadangan energi jangka menengah (Sudirga, 2013). Karbohidrat menjadi sumber energi utama bagi tubuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Fungsi protein dalam tubuh antara lain membantu perkembangan sel dan menjaga pertahanan tubuh (Yuliani, 2018). Protein berperan menyusun seluruh bagian tubuh dan mengganti jaringan yang rusak. Hal ini menjadikan tempe sebagai salah satu makanan sumber karbohidrat dan protein.

Proses pembuatan tempe pada umumnya dilakukan dengan cara konvensional dan belum menerapkan teknologi yang ada secara optimum. Mayoritas produksi tempe dilakukan oleh industri skala kecil dan rumah tangga. Permasalahan yang dihadapi oleh industri kecil atau rumah tangga tempe sangat beragam dan kompleks. Penentuan lokasi industri sangat penting, yaitu pemilihan lokasi yang baik akan menentukan suatu usaha akan berjalan dengan baik (Octiananda dan Nazamuddin, 2016). Pemilihan lokasi menjadi hal utama yang harus ditentukan bagi segala jenis usaha mulai dari dekat dengan keberadaan bahan baku, pasar hingga aksesibilitas lokasi usaha. Pelaku industri tempe lebih memilih ukuran kedelai besar, sehingga saat dijadikan produk tempe akan menghasilkan tempe yang banyak (Roessali et al., 2018). Kualitas kedelai sangat diperhatikan dalam proses pembuatan tempe, namun kedelai dengan kualitas baik tersebut merupakan

hasil impor dari negara lain, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Brasil, dan beberapa negara lainnya. Indonesia belum mampu memproduksi kedelai dengan kualitas yang baik dan sesuai permintaan pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Impor kedelai (ton) menurut negara asal utama 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Impor kedelai (ton) menurut negara asal utama 2015-2019

Negara asal	2015	2016	2017	2018	2019
Amerika Serikat	2.206.443,8	2.236.864,1	2.637.125,0	2.520.253,2	2.513.311,4
Kanada	26.117,2	7.404,9	12.104,0	53.531,3	128.911,8
Malaysia	13.079,3	5.647,3	9.505,5	10.413,1	8.683,5
Argentina	1.000,3	7.498,3	5.000,0	0,0	0,0
Uruguay	4.787,1	2.727,5	2.568,2	0,0	0,0
Ethiopia	2.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tiongkok	2.225,4	1.520,4	0,0	11,8	0,0
Brazil	1.002,6	0,0	500,9	0,0	18.900,0
Myanmar	96,0	0,0	0,0	0,0	46,0
Singapura	0,0	0,0	303,4	1,9	1,7
Prancis	0,0	0,0	0,0	126,8	231,0
Lainnya	0,0	140,8	4.807,1	471,0	1,0
Jumlah	2.256.931,7	2.261.803,3	2.671.914,1	2.585.809,1	2.670.086,4

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

Tabel 3 menunjukkan bahwa Indonesia mengimpor kedelai paling tinggi dari Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara penghasil kedelai terbesar, karena kesesuaian iklim dan didukung oleh teknologi alat mesin pertanian yang canggih untuk memproduksi kedelai secara optimal.

Salah satu industri skala rumah tangga produksi tempe berada di Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Industri tempe skala rumah tangga milik Bapak Suhendi memproduksi tempe dengan jumlah kedelai per produksi sebesar 50 kg. Industri tempe skala rumah tangga masih menggunakan cara konvensional dalam proses pembuatan tempe. Tugas akhir ini dilakukan pada studi kasus industri tempe skala rumah tangga dengan menganalisis kelayakan finansial untuk mengetahui adanya potensi usaha dapat berkembang atau tidak. Masalah yang dihadapi industri tempe skala rumah tangga ini adalah pada harga bahan baku tempe, yaitu harga kedelai cenderung naik, namun permintaan pasar akan tempe tetap tinggi dan jumlah produk yang dihasilkan tetap. Kedelai yang digunakan dalam pembuatan tempe di industri ini menggunakan kedelai impor, karena memiliki bentuk dan ukuran yang besar. Pemilik usaha tidak menaikkan harga jual tempe ketika harga kedelai naik, namun

pemilik usaha mengurangi ukuran tempe. Industri tempe membeli kedelai di Pasar Tengah. Harga rata-rata kedelai impor Januari 2020-Juli 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Harga rata-rata kedelai impor Januari-Juli 2020

No	Nama	Harga per bulan (Rp)							Rata-rata
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	
1.	Pengepul TB	7.200,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00	8.000,00	7.571,43
2.	Pedagang PT	7.400,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00	7.757,14

Sumber: Hasil olah data, 2020.

Keterangan:

Pengepul TB = Pengepul Tanjung Bintang

Pedagang PT = Pedagang Pasar Tengah

Tabel 4 menunjukkan bahwa harga rata-rata bulanan kedelai impor yang digunakan oleh industri tempe yang memperoleh kedelai impor di Pasar Tengah cenderung mengalami kenaikan harga. Kedelai impor adalah barang substitusi dari kedelai lokal, ketika harga kedelai lokal meningkat, maka importir lebih memilih kedelai impor yang harganya lebih murah (Mahdi dan Suharno, 2019). Konsumsi kedelai impor meningkat karena permintaan terhadap kedelai sebagai salah satu sumber protein nabati. Harga terendah pada Januari dan Februari 2020 dan harga tertinggi pada Juli 2020. Harga kedelai di Pasar Tengah cenderung lebih tinggi dibandingkan harga kedelai di Pengepul Tanjung Bintang karena penjual kedelai di Pasar Tengah merupakan penjual eceran, sedangkan penjual kedelai di Tanjung Bintang merupakan pengepul atau pedagang grosir. Pemilik industri tempe skala rumah tangga hanya membeli sebesar 100 kg dalam satu kali pembelian dan memperoleh kedelai dari pedagang besar di Pasar Tengah.

Analisis kelayakan finansial bertujuan untuk melakukan analisis secara kuantitatif terhadap kelayakan finansial dari suatu proyek/usaha dan untuk menentukan keberlanjutan usaha. Berdasarkan uraian di atas, maka judul dari tugas akhir ini adalah Analisis kelayakan finansial industri tempe skala rumah tangga (Studi kasus di Kupang Teba Teluk Betung Utara Bandar Lampung).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah biaya dan penerimaan industri tempe skala rumah tangga di Kupang Teba, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah kelayakan finansial industri tempe skala rumah tangga di Kupang Teba, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung?
3. Bagaimanakah tingkat sensitivitas industri tempe skala rumah tangga terhadap perubahan pada manfaat dan biaya?

1.3 Tujuan Penelitian

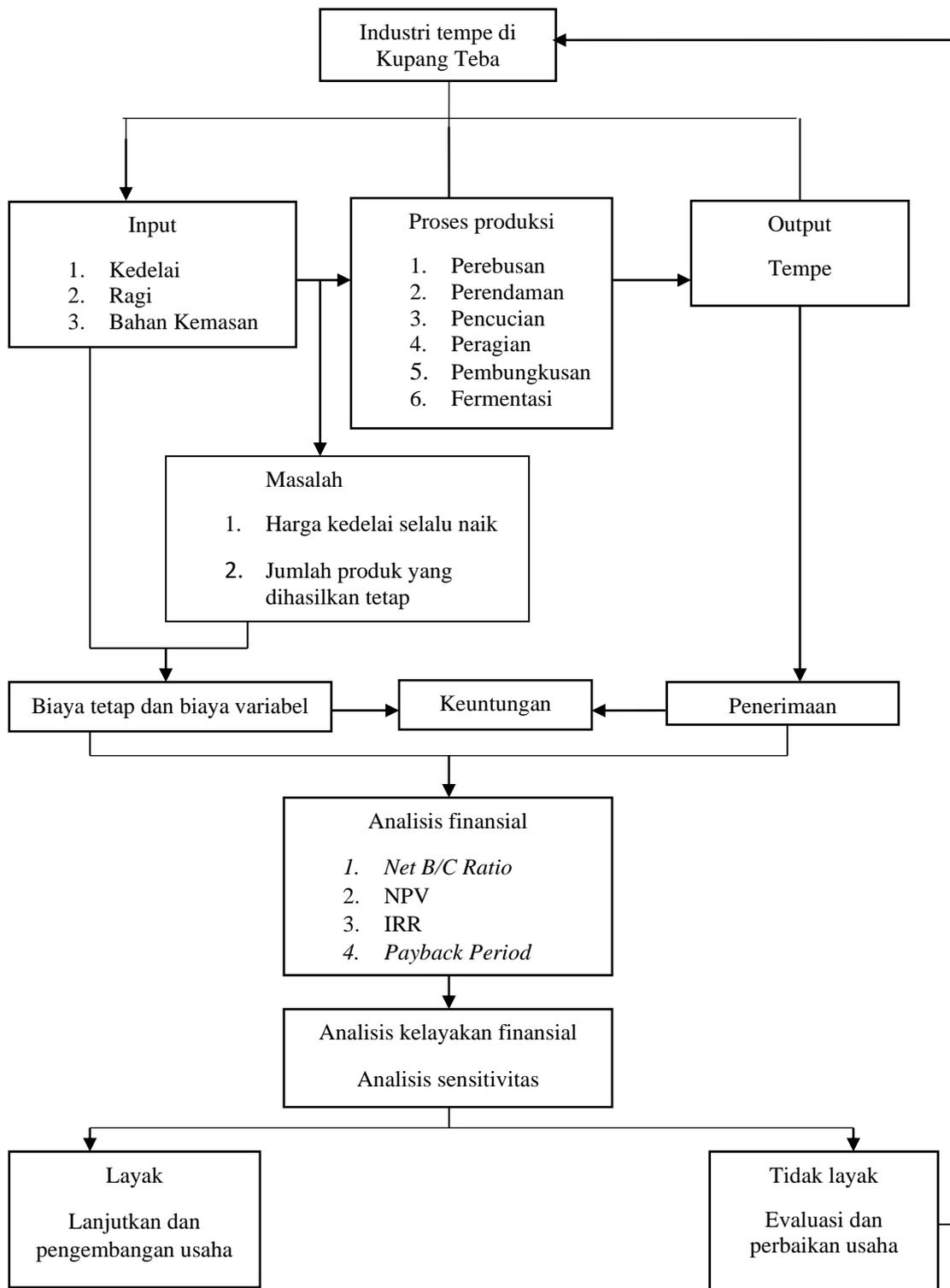
Tujuan pada penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis biaya dan penerimaan industri tempe skala rumah tangga di Kupang Teba, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung
2. Menganalisis kelayakan finansial industri tempe skala rumah tangga di Kupang Teba, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung
3. Menganalisis sensitivitas industri tempe skala rumah tangga terhadap perubahan pada manfaat dan biaya

1.4 Kerangka Pemikiran

Industri tempe skala rumah tangga yang berada di Kupang Teba, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung membutuhkan 50 kg kedelai impor per hari. Pemilik usaha tempe memilih menggunakan kedelai impor, karena bentuk dan ukuran biji kedelai yang besar cocok untuk dijadikan bahan baku pembuatan tempe. Kedelai impor memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan kedelai lokal. Masalah yang dihadapi usaha ini adalah harga kedelai impor cenderung naik dan jumlah produk yang dihasilkan tetap. Pada saat harga bahan baku kedelai naik pemilik usaha tempe tidak menaikkan harga jual tempe, tetapi menyasati dengan cara memperkecil ukuran tempe. Berdasarkan masalah tersebut maka perlu dilakukan analisis kelayakan finansial untuk mengurai analisis secara kuantitatif terhadap kelayakan finansial dari suatu proyek dan untuk menentukan keberlanjutan usaha dan pengembangan usaha. Responden memproduksi tempe dengan melakukan tahapan: penyediaan input, proses pembuatan, dan menghasilkan output. Kegiatan penyediaan input dan proses

produksi tempe menimbulkan adanya biaya variabel dan biaya investasi, sedangkan output yang dihasilkan dari kegiatan produksi akan menghasilkan penerimaan. Hasil pengurangan dari jumlah penerimaan dengan total biaya akan memperoleh keuntungan. Penulis menganalisis kelayakan finansial dengan menggunakan kriteria *Net B/C Ratio*, *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Payback Period* (PP), dan analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengetahui efek yang terjadi akibat perubahan keadaan salah satunya adalah perubahan harga bahan baku. Analisis sensitivitas juga dapat mengetahui dampak adanya perubahan biaya, penurunan produktivitas serta mundurnya jadwal pelaksanaan usaha, jika layak maka usaha patut untuk dilanjutkan dan jika tidak layak maka perlu adanya perbaikan usaha. Secara umum kerangka pemikiran Analisis kelayakan finansial industri tempe skala rumah tangga (Studi kasus di Kupang Teba, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung) dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka pemikiran analisis kelayakan finansial industri tempe skala rumah tangga (studi kasus di Kupang Teba, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung)

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran terhadap penetapan kebijakan guna membantu meningkatkan produksi dan mengembangkan usaha pada pelaku usaha agribisnis sejenis.
2. Bagi pelaku usaha, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai analisis finansial bagi pelaku usaha
3. Bagi peneliti lain, sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang relevan dengan hasil penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Industri

1. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UU No. 20 Tahun 2008 menjelaskan pengertian dari UMKM, yaitu:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

UU No.20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa UMKM memiliki kriteria, yaitu:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah:

- a. Usaha memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
- b. Usaha memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil adalah:

- a. Usaha memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau

- b. Usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah:
- a. Usaha memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
 - b. Usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Badan Pusat Statistik (2016) memberikan definisi UMKM berdasarkan penggunaan jumlah tenaga kerja pada setiap unit usaha, yaitu:

1. Usaha mikro merupakan unit usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 1 sampai dengan 4 orang
2. Usaha kecil merupakan unit usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang
3. Usaha menengah merupakan unit usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang

Berdasarkan penjabaran di atas, maka definisi UMKM dilihat dari besarnya omset dan jumlah karyawan yang dipekerjakan dalam suatu usaha. Besarnya omset akan mempengaruhi kapasitas produksi suatu usaha dan menyebabkan perlu adanya tambahan karyawan untuk mencapai efisiensi produksi.

Karakteristik UMKM adalah hal yang identik dan melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan skala usaha. Bank Indonesia (2015) menjelaskan UMKM dapat diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

1. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
2. UMKM mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin, namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
3. Usaha kecil dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.

4. *Fast moving enterprise* adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.
5. Karakteristik UMKM memiliki tingkatan berdasarkan dengan skala usaha dan kemampuan seorang pengusaha dalam menjalankan usahanya. UMKM yang berkembang untuk menjadi skala usaha besar, maka akan semakin pesat perkembangan UMKM.

Pertumbuhan ekonomi UMKM di kota besar dan pertumbuhan ekonomi di pedesaan sangat erat hubungannya dengan peran penting UMKM. Bank Indonesia (2015) menjelaskan beberapa peran penting UMKM, yaitu:

1. UMKM berperan dalam memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan, peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional.
2. Krisis moneter 1998 dan krisis 2008-2009, yaitu sebesar 96% UMKM tetap bertahan dari guncangan krisis.
3. UMKM sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UMKM juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga.
4. UMKM memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar, sehingga UMKM perlu perhatian khusus yang didukung oleh informasi akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.
5. UMKM di Indonesia sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas.

UMKM memiliki peran yang cukup penting bagi perkembangan ekonomi yang dapat dilihat sejak tahun 1998 dan 2008-2009 sebesar 96% yang mampu bertahan dalam keadaan guncangan krisis moneter hanya UMKM (Bank

Indonesia, 2015). Kemampuan UMKM dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi mampu memberikan sumbangan yang positif dalam hal tersebut. Salah satu masalah ekonomi yang dihadapi adalah pengangguran. Keberadaan UMKM mampu menyerap tenaga kerja, sehingga mengurangi jumlah pengangguran yang ada.

Kendala yang dihadapi oleh UMKM meliputi dua faktor, yaitu faktor internal meliputi modal, SDM, hukum, akuntabilitas dan faktor eksternal meliputi iklim usaha, infrastruktur, dan akses (Bank Indonesia, 2015). Modal menjadi hambatan utama bagi UMKM karena belum adanya manajemen keuangan yang baik yang dilakukan oleh seorang pengusaha. SDM yang masih belum mampu memanfaatkan teknologi hingga belum mampu menguasai pasar dengan baik menjadi kendala yang dihadapi UMKM. Hukum menjadi masalah yang sering dihadapi oleh UMKM karena dianggap rumit dan belum mampu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Masalah internal selanjutnya adalah akuntabilitas disebabkan oleh belum adanya sistem pencatatan dan manajemen keuangan yang baik. Iklim usaha yang masih belum terkoordinasi dengan baik, terbatasnya infrastruktur (sarana dan prasarana) yang berteknologi tinggi dan akses teknologi hingga pasar menjadi beberapa faktor kendala eksternal yang dihadapi oleh UMKM.

2. Industri

UU No. 5 Tahun 1984 menjelaskan pengertian industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengubah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang yang bernilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. UU No. 5 Tahun 1984 menjelaskan tentang tujuan pembangunan industri, yaitu:

1. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi

pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya

3. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional
4. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin berperan aktif pada pembangunan industri
5. Memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri
6. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu, penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada luar negeri
7. Mengembangkan pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka perwujudan wawasan nusantara
8. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.

Kementerian Perindustrian (2020) menjelaskan masalah utama yang dihadapi dalam pembangunan industri nasional, yaitu:

1. Kekurangan bahan baku
2. Kekurangan infrastruktur
3. Kekurangan *utility*
4. Kekurangan tenaga ahli, *supervisor*, dan *superintendent*
5. Adanya tekanan produk impor
6. Adanya limbah industri sebagai limbah B3 dengan spesifikasi yang ketat untuk kertas dan baja bekas, sehingga menyulitkan industri
7. Adanya permasalahan industri kecil menengah (IKM), yaitu masalah pembiayaan, bahan baku dan penolong, mesin dan peralatan, serta pemasaran
8. Adanya permasalahan pada logistik sektor industri.

PP No. 142 Tahun 2015 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan infrastruktur industri untuk mendukung kegiatan industri, yaitu:

1. Mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri
2. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan

3. Meningkatkan daya saing investasi dan daya saing industri
4. Memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang

Kementerian Perindustrian (2020) menjelaskan bahwa pengembangan industri nasional tahun 2020-2024 diarahkan kepada pembangunan 10 industri prioritas, yaitu:

1. Industri pangan (makanan dan minuman)
2. Industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan
3. Industri tekstil, kulit, alas kaki
4. Industri alat transportasi
5. Industri elektronika dan telematika
6. Industri pembangkit energi
7. Industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri
8. Industri hulu agro
9. Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam
10. Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara

Perpres No. 28 Tahun 2008 menjelaskan bahwa menteri bertugas dan bertanggung jawab pada bidang perindustrian untuk menyusun dan menetapkan peta panduan pengembangan kluster industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif, industri kreatif tertentu, dan industri kecil dan menengah (IKM) tertentu. Kementerian Perindustrian (2020) menjelaskan bahwa kebijakan pemberdayaan industri dilaksanakan dengan 3 program, yaitu:

1. Program nilai tambah dan daya saing industri terdapat 4 sasaran, yaitu:
 - a. Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas\
 - b. Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri
 - c. Meningkatnya penguasaan pasar industri
 - d. Penguatan kewirausahaan dan industri kecil dan menengah (IKM)
2. Program dukungan manajemen Kementerian Perindustrian dengan sasaran meningkatnya penggunaan produk dalam negeri
3. Program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi terdapat 2 sasaran, yaitu:
 - a. Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas

b. Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri

Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 11/M-IND/PER/3/2014 menjelaskan bahwa kriteria industri kecil menengah, yaitu:

1. Industri kecil merupakan industri dengan nilai investasi paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Industri menengah merupakan industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Industri kecil menengah (IKM) memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia karena IKM mampu bertahan terhadap krisis ekonomi yang pernah dialami Indonesia beberapa tahun yang lalu dan sebagian besar dari jumlah penduduk di Indonesia berpendidikan rendah, sehingga menjadi pemilik usaha IKM karena pendidikan bukan syarat mutlak pada sektor IKM (Badan Pusat Statistik, 2021). Sumodiningrat (2007) menjelaskan bahwa industri atau usaha kecil memiliki ciri, yaitu:

1. Usaha tidak memisahkan kedudukan pemilik dengan manajerial
2. Usaha menggunakan tenaga kerja sendiri
3. Usaha mengandalkan modal sendiri
4. Usaha sebagian tidak berbadan hukum dan memiliki tingkat kewirausahaan relative rendah

UU No. 9 Tahun 1995 menjelaskan bahwa tujuan pemberdayaan industri atau usaha kecil, yaitu:

1. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh, mandiri, dan dapat berkembang menjadi usaha menengah
2. Meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan guna mewujudkan sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional.

Badan Pusat Statistik (2021) menjelaskan bahwa industri dibagi dalam 4 golongan, yaitu:

1. Industri besar memiliki tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih
2. Industri sedang memiliki tenaga kerja sebanyak 20-99 orang
3. Industri kecil memiliki tenaga kerja sebanyak 5-19 orang
4. Industri rumah tangga memiliki tenaga kerja sebanyak 1-4 orang

Hambatan industri rumah tangga adalah modal, sumber daya manusia, teknologi dan bahan baku (Qoyimah et al., 2014). Modal sangat dibutuhkan untuk mengembangkan usaha, namun masih mengalami kesulitan dalam mengakses modal. Sumber daya manusia harus terampil dan mampu melakukan pengelolaan usaha. Perkembangan teknologi sangat dibutuhkan industri rumah tangga untuk memproduksi produk agar lebih efisien. Ketersediaan bahan baku yang langka dan harga yang fluktuatif dapat menjadi faktor penghambat industri rumah tangga.

2.2 Karakteristik Kedelai

Kedelai merupakan salah satu komoditas tanaman polong-polongan yang mengandung protein nabati tinggi dan digunakan sebagai bahan baku berbagai macam produk olahan, yaitu tempe, tahu, kecap, dan produk olahan lainnya. Kedelai tidak hanya dijadikan sebagai sumber protein nabati, namun sebagai pangan fungsional yang mencegah penyakit degeneratif, yaitu penuaan dini, jantung koroner, dan hipertensi (Ginting et al., 2009). Kedelai memiliki ragam manfaat yang baik bagi tubuh, sehingga dapat menjadi alasan konsumen untuk mengonsumsi makanan olahan kedelai. Kebutuhan kedelai yang meningkat dapat dikaitkan dengan meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap tahu, tempe, dan kecap (Mursidah, 2005). Peningkatan konsumsi bahan makanan olahan kedelai terjadi karena pertumbuhan populasi penduduk dan sebagai salah satu kebutuhan konsumsi masyarakat. Bahan baku tempe sebagian besar masih menggunakan kedelai impor yang dianggap memiliki kualitas fisik lebih baik dibanding kedelai lokal (Ginting et al., 2009). Kedelai sudah menjadi salah satu konsumsi pokok bagi masyarakat Indonesia, namun kebutuhan kedelai masih bergantung pada impor.

2.3 Produksi Tempe

Tempe merupakan makanan yang dibuat dari biji kedelai atau beberapa bahan lain yang diproses melalui fermentasi dari apa yang secara umum dikenal sebagai “ragi tempe” (Badan Standarisasi Nasional, 2012). Kedelai yang menjadi bahan baku utama pembuatan tempe harus memenuhi berbagai syarat yang sesuai dengan kebutuhan produksi. Ketentuan syarat tersebut dapat dilihat mulai dari bentuk kedelai, ukuran hingga warna. Kualitas kedelai yang baik dan sesuai akan menghasilkan produk tempe yang berkualitas. Ukuran biji kedelai merupakan faktor penentu kualitas tempe terutama bobot, volume tempe, dan sifat sensorisnya (Ginting et al., 2009). Tempe merupakan salah satu makanan yang mengandung protein nabati yang diperlukan oleh tubuh manusia. Tempe mengandung berbagai kandungan gizi, yaitu asam lemak, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B kompleks, mineral, dan antioksidan (Badan Standarisasi Nasional, 2012). Asam lemak tidak jenuh dapat menetralkan kolesterol dalam tubuh. Vitamin B12 biasanya ditemui pada produk hewani dan tempe merupakan produk nabati yang dapat menghasilkan vitamin tersebut. Tempe juga dapat menyediakan mineral-mineral penting, yaitu besi, tembaga dan zink yang dibutuhkan oleh tubuh. Antioksidan mampu mencegah penuaan dini. Badan Standarisasi Nasional (2012) menjelaskan bahwa langkah-langkah proses pembuatan tempe sebagai berikut:

1. Penyortiran kedelai dilakukan agar mendapatkan biji kedelai yang bagus. Cara melakukan penyortiran, yaitu menempatkan biji kedelai pada tampah dan ditampi.
2. Biji kedelai dicuci dengan air yang mengalir.
3. Biji kedelai yang sudah bersih dimasukkan ke dalam panci berisi air, kemudian direbus selama 30 menit atau sampai mendekati setengah matang.
4. Kedelai yang sudah direbus, kemudian direndam selama semalam hingga menghasilkan kondisi asam.
5. Kulit ari kacang kedelai dikupas setelah direndam. Kulit ari kedelai dikupas dengan cara memasukkan kedelai ke dalam air, lalu diremas-remas sambal dikuliti, sehingga biji kedelai terbelah menjadi keeping biji.

6. Keping biji kedelai dicuci sekali lagi, yaitu dengan cara yang sama seperti mencuci beras yang hendak ditanak.
7. Keping kedelai dimasukkan ke dalam dandang lalu ditanak, mirip seperti menanak nasi.
8. Kedelai yang sudah matang diangkat dan dihamparkan tipis-tipis di atas tampah hingga dingin dan keping kedelai mengering.
9. Proses selanjutnya adalah menambahkan ragi. Pemberian ragi pada kedelai dicampurkan sambil diaduk hingga merata dengan perbandingan 1 kg kedelai menggunakan sekitar 1 gram ragi.
10. Kedelai yang sudah bercampur rata dengan ragi dibungkus menggunakan daun pisang atau plastik.
11. Kedelai yang sudah diperam jika pembungkusnya berupa plastik, maka pemeraman dilakukan di atas kajang-kajang bambu yang diletakkan pada rak-rak. Jika pembungkusnya berupa daun, maka pemeraman dilakukan pada keranjang bambu yang ditutup goni.
12. Kedelai yang sudah diperam semalaman, kemudian ditusuk dengan lidi yang memiliki tujuan agar udara segar dapat masuk ke dalam bahan tempe.
13. Kedelai diperam lagi semalaman dan keesokan harinya tempe yang dibuat telah jadi dan siap dikonsumsi.

2.4 Analisis Kelayakan Finansial

Analisis finansial dapat memperhitungkan keuntungan dan manfaat yang diterima pribadi atau institusi pemodal dalam mensukseskan pelaksanaan proyek. Analisis kelayakan finansial memiliki tujuan untuk mengurai analisis kuantitatif terhadap kelayakan finansial (keuangan) dari suatu proyek (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, 2017). Hal ini akan menunjukkan suatu usaha membutuhkan dukungan fiskal dan pendanaan tambahan dari pemerintah. Analisis kelayakan finansial mencakup tentang kelayakan proyek secara keuangan, dengan memberikan gambaran secara jelas terhadap kinerja keuangan dari sisi penerimaan dan pengeluaran keuangan proyek, termasuk risiko yang akan dihadapi selama siklus proyek (*project viability*). Biaya yang dibutuhkan selama siklus proyek (*life-cycle costs*) dengan kerangka waktunya, biaya investasi/modal, pengadaan tanah, biaya konsultasi, biaya operasi dan

pemeliharaan. Perbedaan antara analisis ekonomi dengan analisis kelayakan finansial, yaitu menggunakan harga pasar, serta memperhitungkan pajak dalam analisis biayanya, sehingga akan mengurangi benefit. Besaran subsidi berdampak mengurangi biaya investasi proyek apabila terdapat subsidi. Analisis kelayakan finansial yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari *Net Present Value* (NPV), *Net B/C Ratio*, IRR, *Payback Period* (PP) dan analisis sensitivitas.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi tentang para peneliti yang telah melakukan penelitian sebelumnya mengenai analisis kelayakan finansial, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dan memberikan perbedaan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 5.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah menggunakan alat analisis kelayakan finansial, yaitu *Net Present Value* (NPV), *Net Benefit Cost Ratio* (*Net B/C Ratio*), *Internal Rate of Return* (IRR), *Payback Period* (PP), dan analisis sensitivitas. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jenis usaha, waktu penelitian, tempat penelitian dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi usaha mampu berkembang atau tidak. Jenis usaha yang diteliti adalah industri tempe studi kasus di Kupang Teba, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Waktu penelitian pada industri tempe dilaksanakan pada September 2020 hingga Oktober 2021. Masalah yang dihadapi industri tempe ini adalah harga kedelai yang cenderung naik dan jumlah produk yang dihasilkan tetap. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan usaha layak untuk dikembangkan atau tidak dengan menggunakan tiga skenario analisis sensitivitas, yaitu skenario 1 (kenaikan harga kedelai), skenario 2 (penurunan jumlah hari produksi), dan skenario 3 (kenaikan harga kedelai dan penurunan jumlah hari produksi).

Tabel 5. Penelitian terdahulu

No.	Judul, penulis, tahun	Metode analisis	Hasil
1.	Judul: Analisis Finansial pada Usaha Jamur Merang (Studi Kasus di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya) Penulis: Rasmianti (2016)	Analisis kelayakan finansial (NPV, IRR, <i>B/C Ratio</i> , BEP, PP)	Usaha ini layak untuk dijalankan berdasarkan hasil analisis kelayakan finansial (NPV, IRR, <i>B/C Ratio</i> , BEP, PP).
2.	Judul: Analisis Kelayakan Agroindustri Tahu (Kasus: Nagori Pematang Simalungun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun) Penulis: Siregar, N (2016)	Analisis kelayakan finansial (NPV, EIRR, Net <i>B/C Ratio</i> , dan PP) dan analisis ekonomi (analisis harga bayangan)	Usaha ini layak untuk dijalankan berdasarkan hasil dari analisis kelayakan finansial (NPV, EIRR, Net <i>B/C Ratio</i> , dan PP) dan analisis ekonomi (analisis harga bayangan)
3.	Judul: Analisis Kelayakan Finansial Agroindustri Dodol <i>Strawberry</i> (Studi Kasus UD. Wisata Malino Dusun Parangbobo Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa) Penulis: Mustamin, W.R (2018)	Analisis kelayakan finansial (NPV, IRR, <i>B/C Ratio</i> , PP, dan analisis sensitivitas) dan analisis non finansial.	Usaha ini layak untuk dijalankan berdasarkan hasil dari analisis kelayakan finansial (NPV, IRR, <i>B/C Ratio</i> , PP, dan analisis sensitivitas) dan analisis non finansial.
4.	Judul: Analisis Kelayakan Finansial Usaha Pengolahan Gula Aren di Kabupaten Sinjai Penulis: Fitriani, A (2018)	Analisis finansial (BEP, <i>R/C Ratio</i> , <i>B/C Ratio</i>) dan aspek teknis	Usaha ini layak untuk dijalankan berdasarkan hasil dari analisis finansial (BEP, <i>R/C Ratio</i> , <i>B/C Ratio</i>) dan aspek teknis.
5.	Judul: Analisis Kelayakan Usaha Kelengkeng “Jember Super” (Studi pada Usaha Kelengkeng “Jember Super” Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Jawa Timur) Penulis: Sandy, S.P (2020)	Analisis kelayakan finansial (NPV, IRR, <i>B/C Ratio</i> , PP, dan analisis sensitivitas), analisis teknis, analisis aspek pasar, dan AMDAL.	Usaha ini layak untuk dijalankan berdasarkan hasil dari analisis kelayakan finansial (NPV, IRR, <i>B/C Ratio</i> , PP, dan analisis sensitivitas), analisis teknis, analisis aspek pasar, dan AMDAL.